

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas tugas dan Fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekaligus sebagai alat kendali untuk memacu meningkatkan kinerja di lingkungan Dinas Peradagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur selama tahun 2024, yang hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan ditahun berikutnya.

I.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dengan memperhatikan Peraturan Perundang Undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme;

2024

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 Nomor 4)
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6)
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur,

2024

17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45)
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur TA 2024
20. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
21. Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

I.3 Gambaran Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, yang pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, memiliki Tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian :

I. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

II. Fungsi

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian energy dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kabijakan bidang Perdagangan, Perindustrian energy dan sumber daya mineral;
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;

2024

4. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. Penyusunan program dan anggaran;
3. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah serta urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penatausahaan administrasi perkantoran;
2. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
3. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
4. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
5. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
6. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Dinas. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;

2024

2. Perencanaan program, data dan evaluasi;
3. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perindustrian. Dalam melaksanakan Tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja perindustrian;
2. Perumusan kebijakan teknis perindustrian;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan perindustrian;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perdagangan. Dalam menjalankan Tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis perdagangan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan perdagangan;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Meterologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Meterologi dan Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja meterologi dan perlindungan konsumen;
2. Perumusan kebijakan teknis meterologi dan perlindungan konsumen;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan meterologi dan perlindungan konsumen;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan meterologi dan perlindungan konsumen; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2024

Jabatan Fungsional dan Pelaksana, selain jabatan struktural pada Dinas terdapat jabatan fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian.

I.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian; Subag Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Subbag Program Data dan Evaluasi, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Merologi dan Perlindungan Konsumen serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur secara baik dan akuntabel, kualitas Sumber Daya Manusia sangat penting, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah pegawai pada awal tahun 2024 sebanyak 26 orang, selama tahun 2024 tidak ada mutasi pegawai keluar, pensiun 2 (dua) orang tugas belajar 1 (satu) orang, pegawai masuk 7 (tujuh) orang, sehingga pada akhir Tahun 2024 jumlah pegawai sebanyak 24 orang, dan 4 (empat) orang tenaga kontrak dengan rincian sbb :

- ASN : 16 orang
- PPPK : 8 orang
- Jumlah : 24 orang

Dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 4 orang.

2024

a. Kompetensi Pegawai

Gambaran Kompetensi Aparatur dari unsur PNS Organik dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1

Menurut Tingkat Pendidikan Formal (ASN) :

No Urt.	Jenis Kelamin	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	SARMUD/ DIPLOMA	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laki-laki	4	2	6	1	13
2.	Perempuan	3	1	7	-	11
	Jumlah	7	3	13	1	24

Tabel 2

Menurut Golongan / Kepangkatan :

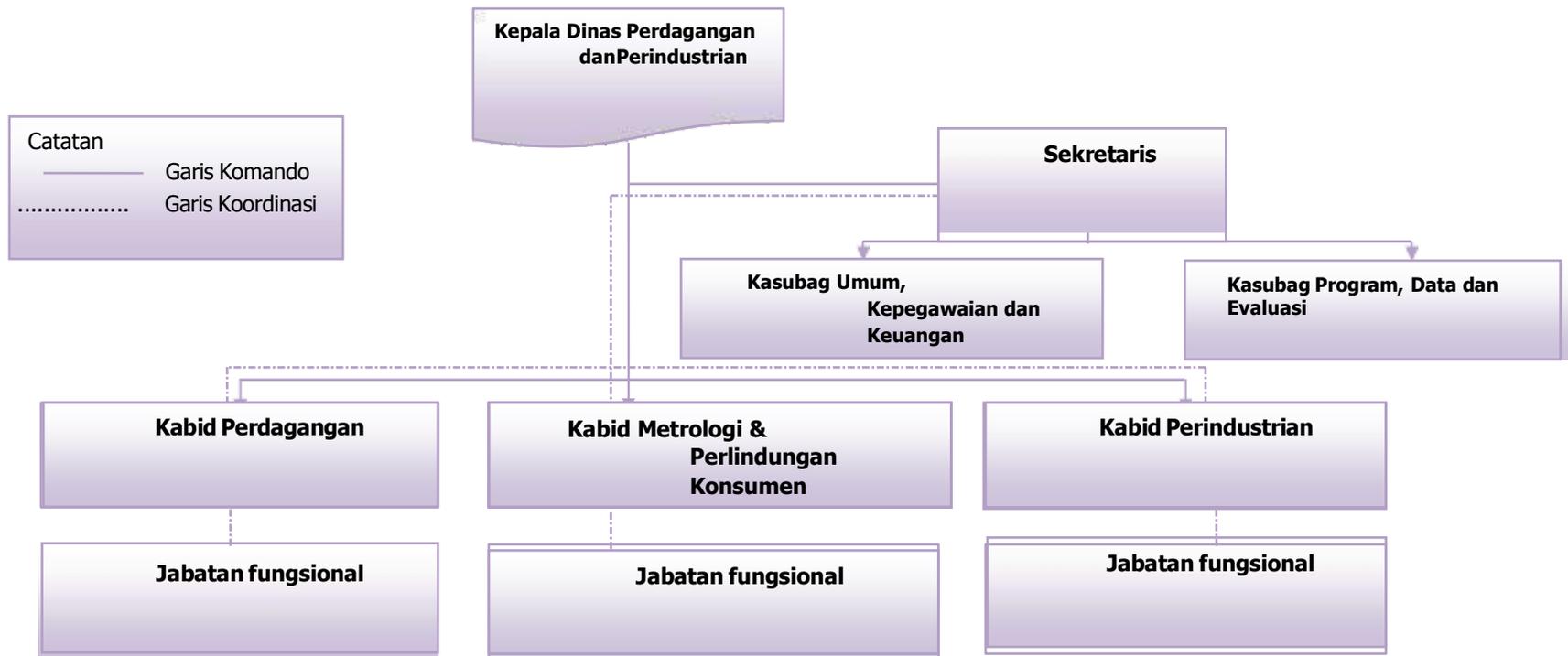
No Urt.	Jenis Kelamin	Golongan / R. Gaji				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laki-laki	-	-	10	3	13
2.	Perempuan	-	2	8	1	11
	Jumlah	-	2	13	2	24

Tabel 3

Menurut Pendidikan Penjenjangan :

No	Jenis kelamin	Pim. II	Pim. III	Pim. IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Laki-laki	-	2	2	4
2.	Perempuan	-	-	2	2
	Jumlah	-	2	4	6

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR



I.5 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya daya saing ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Pendapatan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • UMKM dan IKM tidak berkembang
		<ul style="list-style-type: none"> • Peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UMKM dan IKM kesulitan mendapatkan modal kerja dan modal investasi ▪ Kurangnya inovasi produk ▪ Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk
		Ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan belum terwujud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya pendapatan sektor industry ▪ Naiknya angka inflasi Menurunnya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

Penentuan Isu-Isu Strategis

Kondisi industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur, secara umum masih perlu dilakukan peningkatan Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Hal ini menjadi salah satu tugas Pemerintah. Indikator utama Terwujudnya daya saing daerah dengan prioritas dan sasaran Pembangunan pada perekonomian Masyarakat dan peningkatan terhadap peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah serta peningkatan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Menurunnya penghasilan Masyarakat akibat daya beli Masyarakat akibat daya beli masyarakat yang rendah
2. Masih rendahnya Peran UMKM dan IKM menunjang peningkatan perekonomian
3. Belum terwujudnya Ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan

I.6 Tujuan Dan Manfaat Lakip

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur di susun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan MenPAN RB No. 29 Th.2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur agar terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

I.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan sistematika laporan kinerja sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasidan sekilas pengantar lainnya
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Berisi ikhtiar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjajjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
- **BAB IV PENUTUP**
- **LAMPIRAN**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mendukung visi daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Terwujudnya daya saing daerah
2. Terwujudnya Pembangunan yang merata , berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya manusia dan Masyarakat yang berkualitas
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

2.2. Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah serta target kinerjanya disajikan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,94	
		• Meningkatkan pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	4,61	4,65	4,71	
		• Laju inflasi daerah	Menurunnya Laju Inflasi Daerah	-2,02	0,45	0,45	0,55	0,55	

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025, serta rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN
1	<p>Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB industri pengolahan</p> <p>Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB industri pengolahan</p>	<p>Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)</p> <p>Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)</p>	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p>	<p>$\frac{\text{PDRB}(T+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$</p> <p>Dimana : (t+1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$</p>
	<p>Menurunnya angka inflasi Daerah</p> <p>Pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok</p>	<p>Laju Inflasi (point)</p> <p>cakupan pengawasan dan pengendalian harga bahan</p>	<p>Perdagangan</p> <p>Perdagangan</p>	<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>	<p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p> <p>BPS : Flotim Dalam angka 2021</p> <p>Laporan Tahunan OPD</p>	<p>$((1 + \Delta\text{Inf}1) + \Delta\text{Inf}2 + \Delta\text{Inf}t) 1 / t) - 1$</p> <p>Dimana : $\Delta\text{Inf}1$: Perubahan inflasi dari nilai tahun Sebelumnya</p> <p>t; Periode Pengamatan Perubahan Nilai inflasi</p> <p>$\frac{\text{Capaian pengawasan dan pengendalian thn n}}{\text{Total Bahan Pokok}} \times 100\%$</p>

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026

Tabel 2,4 Tabel Kinerja Tahunan Disperdagind Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2026
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	2,94
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan PDRB 	Pertumbuhan PDRB (%)	4,71
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan Laju inflasi daerah 	Laju Inflasi Daerah	0,55

2.5. Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai :

- (a) wujud nyata komitmen antara perantara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi;
- (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah;
- (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN
1	Terwujudnya daya saing daerah	1. % pertumbuhan ekonomi	%	1,75	12 Bulan
1.1	Terwujudnya daya saing ekonomi	2. Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,61	12 Bulan
		3. Laju Inflasi Daerah	%	0,45	12 Bulan

2.6. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024, alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dialokasi dalam APBD Murni Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.248.518.985,- dan pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.354.994.205,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.186.600.705,- dan Belanja Modal sebesar Rp.168.393.500,-. Anggaran Belanja Langsung tersebut dialokasikan ke dalam 6 Program, 14 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yaitu :

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota didukung 8 Kegiatan dengan 31 Sub Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan;
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan;
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan

Adapun alokasi anggaran berdasarkan program tersebut di atas secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Rp 2.649.346.813	8	31
2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 109.998.352	2	2
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Rp 189.999.234	1	3
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 74.998.600	1	2
6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 59.784.406	1	2
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 270.866.800,-	1	2
TOTAL		Rp 3.354.994.205	14	42

Perbandingan Pagu Sebelum Perubahan dengan Pagu Setelah Perubahan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Flores Timur TA.2024

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.609.856.393	2.649.346.813
2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	109.999.442	109.998.352
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	144.999.314	189.999.234
4.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	74.998.600	74.998.600
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	84.995.406	59.784.406
6.	Perencanaan dan pembangunan Industri	223.679.850	270.866.800
Jumlah		3.248.518.985	3.354.994.204

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANSISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2004 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai peringkat kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rp. 3.075.083.395,-}}{\text{Rp. 3.354.994.205,-}} \times 100 \%$$

= 91,66 %

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	➤ 85 – 100	Memuaskan
2.	A	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	➤ 65 – 75	Baik
4.	CC	➤ 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	➤ 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Indikator kinerja menunjukkan nilai 91,66 % rentang nilai berada di antara 85 – 100 menunjukkan interpretasi Memuaskan, sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah memuaskan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2024 yaitu :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB
3. Menurunnya laju inflasi daerah

Pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024

Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan indikator kinerjanya adalah Input, Output, dan Outcomes dapat dijelaskan per program sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan hingga akhir tahun 2024 dengan 6 Program 14 Kegiatan 42 Sub Kegiatan Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- 1.1. **Kegiatan** Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab. Kota
- | | |
|-----------------|----------|
| Target | : 3 IKM |
| Realisasi | : 19 IKM |
| Capaian Kinerja | : 633% |

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah Fasilitasi terhadap IKM dan kegiatan yang dilakukan adalah Pendampingan dan fasilitasi IKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pada Tahun 2024 kegiatan promosi dalam bentuk memfasilitasi IKM dalam keikutsertaan pada kegiatan Festival Lamaholot di Lembata sebanyak 12 IKM dan Festival Mekko sebanyak 7 IKM. Dengan tujuan untuk mempromosikan budaya lokal kerajinan tenun ikat , pangan lokal (keripik , VCO, Varian Jagung Titi, Kopi) kerajinan Bambu yang menjadi daya tarik Flores Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

- 1.2. **Kegiatan** Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan : Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab. Kota
- | | |
|-----------------|----------|
| Target | : 5 IKM |
| Realisasi | : 18 IKM |
| Capaian Kinerja | : 360 % |

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah Fasilitasi IKM dalam Kegiatan Bimtek Pemasaran On line yang dilakukan selama 2 (dua) hari bertempat di Rumah Susun Kecamatan Larantuka yang diikuti oleh 18 IKM dan Nara Sumber yang melibatkan Dinas Koperasi UKM, Tenaga Ahli Digital Marketing dan Kewirausahaan Kabupaten Flores Timr. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta dalam memasarkan produk melalui digitalisasi sehingga secara langsung dapat meningkatkan kapasitas SDM dalam pemasaran produk, membantu pelaku usaha dalam memberikan branding, menentukam target pasar dan juga mmbantu pelaku usaha dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- 2.1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- | | |
|-----------------|-------------|
| Target | : 1 Dokumen |
| Realisasi | : 1 Dokumen |
| Capaian Kinerja | : 100 % |

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah Dokumen Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Peradagangan

Kinerja yang dilakukan dari Sub kegiatan ini adalah

- Melakukan Pengambilan data / identifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Adonara Barat (Waiwadan dan sekitarnya)
- Melakukan persiapan / pematapan kegiatan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Adonara Barat
- Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Adonara Barat (Waiwadan) kegiatan Pembinaan Pedagang kaki lima di Kecamatan Adonara Barat terhadap 30 PKL dari 36 PKL yang terdata yang melibatkan Nara sumber Dinas Perdagangan dengan materi Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan di Kabupaten Flores Timur, Nara Sumber Kapolsek Adonara Barat dengan materi Peran Serta Aparat Kepolisian terhadap Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan di Ibukota Kecamatan Adonara Barat agar menjadi ASRI (Aman, Bersih, Rapi dan Indah) Nara Sumber Camat Adonara Barat dengan materi Peran Serta Pihak Kecamatan Adonara Barat terhadap Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan di Waiwadan dan sekitarnya

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan pedagang asongan di Kecamatan Adonara Barat (Waiwadan dan sekitarnya) dan Memotivasi dan menambah wawasan para Pedagang Kaki Lima dan pedagang asongan agar dapat menjadi lebih baik, memupuk kerjasama yang baik antar pedagang kaki lima dan pedagang asongan, mendapatkan saran atau masukan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi para pedagang kaki lima dan pedagang asongan

3. Program Stabilisasi Harga Barang dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3.1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota

3.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Target	: 1 Laporan
Realisasi	: 1 Laporan
Capaian Kinerja	: 100 %

Capaian Kinerja dari Kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota,.

Kinerja dari sub kegiatan ini adalah

- Pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada Pasar Daerah Larantuka secara rutin;
- Pengadaan running teks informasi harga sebagai informasi untuk Masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait perkembangan harga pasar untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang berlaku di pasar saat ini sehingga dapat memberikan informasi terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang berlaku di pasar kepada Masyarakat.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya Data dan Informasi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan pengambilan/penentuan langkah kebijakan Pemerintah Daerah.

3.1.2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang terintergrasi dalam system informasi perdagangan

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja: 100 %

Kinerja dari Sub Kegiatan ini adalah dilakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang (Pertokoan, Gudang Agen, Bulog) secara rutin.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memperoleh data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada Pelaku usaha Distribusi Barang sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang berlaku pada pelaku usaha Distribusi barang

3.1.3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian Kinerja : 100 %

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak.

Untuk mencapai target capaian kinerja maka dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan penandatanganan kontrak sewa pakai sarana pasar pada pasar daerah Larantuka, pasar Lamawalang, pasar Waiwerang, Pasar Waiwadan dan Pasar Boru;
- Penagihan retribusi harian pasar yakni pada pasar daerah Larantuka selama 8 bulan (Januari – Agustus 2024), dikarenakan sejak bulan September 2024 retribusi harian pasar daerah Larantuka mulai dikelola oleh pihak ketiga FTF Globalindo;
- Penagihan retribusi pasar pada pasar Lamawalang (hari Selasa dan Rabu) dan pasar Waiwadan (hari Rabu dan Sabtu) selama 12 bulan (Januari – Desember 2024);
- Penagihan retribusi pasar pada pasar Waiwerang (hari Senin dan Kamis) dan pasar Baniona (hari Sabtu) selama 11 bulan (Februari – Desember 2024)
- Penagihan retribusi pada pasar Boru (hari Senin) selama 6 bulan (Mei – Oktober 2024.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sikka untuk tahun 2024 ini kegiatan Operasi pasar murah bersubsidi tidak dapat dilaksanakan karena regulasi terkait penetapan harga subsidi belum ada.

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

4.1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang

Dengan capaian kinerja sbb :

Target	: 300 unit
Realisasi	: 209 Unit UUTP
Capaian Kinerja	: 69,67 %

Capaian Kinerja dari Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang.

Berupa :

- Pelaksanaan sidang tera tera ulang di lakukan di 2 lokasi yaitu Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur (Waiwerang), bertempat di Pasar Inpres Larantuka, Pasar Lamawalang dan Kantor Camat Adotim .
Jumlah peralatan yang tera 209 unit dari target 300 Unit dari jumlah potensi UUTP 1.783 unit . selain peralatan UUTP yang ditera dilakukan tera timbangan di unit Asphalt Mixing Plan (AMP) Milik PT Sarana Agung Perkasa, PT Bumi Permai Nusantara dan PT Krisindo Sejahtera di Kabupaten Flores Timur dan PT. Setyo Budi Putra, Tera Ulang Pompa Ukur BBM Milik SPBU 01, di Larantuka, SPBU KOMPAK di Waiwerang SPBU 05 Weri Larantuka dan SPBU 06 di Kimak Kamak Adobar, Pertashop Wulanggitang.

- MOU antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Pemkab Nagekeo untuk melakukan pelayanan sidang tera.

Selain pelaksanaan sidang tera anggaran kegiatan ini digunakan juga untuk Biaya Jasa Kalibrasi peralatan standar Metrologi yang dilakukan oleh petugas teknis Penera dari BSMR Reg II Yogyakarta, Pengembalian CTT (Cap Tanda Tera) 2023 dan pengambilan CTT tahun 2024. Adapun dari kegiatan ini menghasilkan PAD sebesar Rp. 36.050.000,- dari target Rp. 20.000.000,- (180,25%) dari biaya sewa peralatan standar sesuai dengan Perda Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Kegiatan Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 100 org / pelaku usaha

Realisasi : 90 orang / pelaku usaha

Capaian Kinerja : 90 %

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah dilakukan Pengawasan terhadap penggunaan peralatan UUTP dan perlengkapannya pada pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah di Kota Larantuka , Kecamatan Tanjung Bunga (Pasar Ratulodong dan Pasar Waibao) Sekaligus melakukan penyuluhan langsung kepada pemilik UUTP tentang manfaat dari tera tera ulang.

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

5.1. **Kegiatan** Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dengan capaian kinerja sbb :

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Flores Timur (RPIK) 2025 – 2045, dalam penyusunan Dokumen tersebut dilakukan beberapa kegiatan meliputi :

- Pelaksanaan Forum Discucion Group untuk membahas Naskah Akademik RPIK 2025-2045.
- Rapat – rapat Tim Penyusun (termasuk Tim Ahli dari Kemenkuham Kupang) dalam rangka membahas dan menyusun batang tubuh dan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah di secara internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, Bagian Hukum Setda Flores Timur dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTT
- Pengambilan data data pendukung untuk melengkapi data Naskah Akademik RPIK dengan lokus pada beberapa lokasi yakni di Kecamatan Solor Barat, Solor Selatan, Ile Boleng, Larantuka (BUMN dan OPD terkait) dan Kecamatan Demon Pagong.

- Memfasilitasi Tim Ahli Penyusun Perda RPIK dari Kemenkuham Kupang.
- Mengikuti Rapat Pembahasan Khusus Ranperda RPIK Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 – 2045
- Melakukan Sosialisasi Ranperda RPIK Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 – 2045 Bersama Bagian Hukum dan DPRD Kabupaten Flores Timur di 19 Kecamatan.
- Melakukan Harmonisasi Ranperda RPIK di Kementrian HukumHam Kupang.
- Melakukan Evaluasi Ranperda RPIK di Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang

5.2. **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dengan capaian kinerja sbb :

Target	: 1 Dokumen
Realisasi	: 1 Dokumen
Capaian Kinerja	: 100 %

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri terdiri dari

- Dokumen Bantuan Hibah kepada Dekranasda Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 50.000.000,-
- Finalisasi Dokumen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Kabupaten Flores Timur untuk memperoleh sertifikasi Hak akan Kekayaan Intelektual terhadap 14 Motif Tenun Ikat Flores Timur (Motif Bunga Pecah Piring dari Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Bunga mekar dari Kelurahan Waibalun, Kolong Matan dari Desa Wailolong, Pohon Baiduri dari Desa Kawaliwu dan Painapang, Ula Age dari Desa Lewokluwok, Bunga Bakau dari Desa Birawan/Lewotobi, Kembang Kecil dari Desa Pululera/sukutukan, Diken Belen dari Desa Balaweling, Kalisi”ing(ana panah) dari Desa Tanah Lein, Inang (Ibu Pengasuh) dari Desa Lemanu, Lurik Hitam dan Hijau dari Desa Lamatwelu, Musang Lompat antar Pohon dari Desa Gayak dan dari Desa Waitukan, ’
- Melakukan pendampingan Mulok Kerajinan Anyaman Bambu, Daun Lontar dan Tenun Ikat di SMP berasrama Ancop Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong.
- Melakukan Pendampingan Bimtek Pengolahan Jagung di Desa Watututu Kecamatan Ilemandiri.

6. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

6.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan

Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya dokumen Renja 2025 dan Renj Perubahan 2024

- ❖ Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
Target : 2 Dokumen
Realisasi : 2 Dokumen
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya dokumen RKA 2025 dan RKA
Perubahan 2024

- ❖ Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Target : 3 Laporan
Realisasi : 3 Laporan
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ

- ❖ Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target : 4 Laporan
Realisasi : 4 Laporan
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Laporan Evaluasi Renja , Renstra
Triwulan I s/d IV

6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target : 25/14 Bulan
Realisasi : 25/14 Bulan
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

- ❖ Sub Kegiatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target : 12 Dokumen
Realisasi : 12 Dokumen
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas
ASN

- ❖ Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/
semesteran SKPD

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran skpd

6.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan :

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100 %

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

❖ Sub Kegiatan :

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target : 6 Laporan

Realisasi : 6 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah

❖ Sub Kegiatan :

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target : 6 Laporan

Realisasi : 6 Laporan

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

6.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Target : 12 Dokumen

Realisasi : 12 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Dokumen Pendataan dan pengolahan Admnistrasi Kepegawaian

❖ Sub Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Dokumen hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

6.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Target : 3 Paket

Realisasi : 1 Paket

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target : 3 Paket

Realisasi : 2 Paket

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target : 1 Paket

Realisasi : 1 Paket

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor

❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Logistik Kantor

Target : 1 Paket

Realisasi : 1 Paket

Capaian Kinerja : 100%

Tersedianya bahan Logistik kantor.

❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target : 1 paket
Realisasi : 1 paket
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

❖ Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan perundang Undangan
Target : 1 dokumen
Realisasi : 1 dokumen
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Bahan bacaan (Pos Kupang)

❖ Sub Kegiatan :
Penyediaan Fasilitas Kunjungan tamu
Target : 12 Laporan
Realisasi : 12 Laporan
Capaian Kinerja : 100 %
Tersedianya belanja makan dan minum untuk rapat dan tamu

❖ Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target : 12 Laporan
Realisasi : 12 Laporan
Capaian Kinerja : 100 %
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

6.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ Sub Kegiatan :
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Target : 3 Unit
Realisasi : 1 Unit
Capaian Kinerja : 100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
(Sound Sistem)

❖ Sub Kegiatan :
Pengadaan Mebel

Target : 20 Unit
Realisasi : 30 Unit
Capaian Kinerja : 150%
Tersedianya Mebel (Kursi putar 6 buah, kursi plastic rapat 22 buah, lemari arsip 2 buah)

- ❖ Sub Kegiatan :
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Target : 3 Unit
Realisasi : 6 Unit
Capaian Kinerja : 200%
Tersedianya Peralatan dan Mesin (Laptop Acer Aspire 5, 1 unit, printer Canon MG2570S 4 Unit , AC LG 1 Unit)

6.7. Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah

- ❖ Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Target : 12 Laporan
Realisasi : 12 Laporan
Capaian Kinerja : 100 %
Tersedianya Laporan belanja jasa surat menyurat
- ❖ Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 12 Laporan
Realisasi : 12 Laporan
Capaian Kinerja : 100 %
Tersedianya Laporan belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
- ❖ Sub Kegiatan :
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
Target : 12 Laporan
Realisasi : 12 Laporan
Capaian Kinerja : 100 %
Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

6.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

- ❖ Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Target : 7 unit

Realisasi : 7 unit

Capaian Kinerja : 100 %

Kendaraan Dinas yang dilayani perizinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas.

❖ Sub Kegiatan :

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Target : 1 Unit

Realisasi : 1 Unit

Capaian Kinerja : 100%

Terpeliharanya peralatan dan mesin

❖ Sub Kegiatan :

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 2 Unit

Realisasi : 2 Unit

Capaian Kinerja : 100%

Terpeliharanya gedung kantor

❖ Sub Kegiatan :

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Target : 2 unit

Realisasi : 2 unit

Capaian Kinerja : 100%

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana gedung kantor

2. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Adapun Analisis Kinerja untuk melihat pencapaian per sasaran dari 3 sasaran yang ada dalam renstra beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Renstra 2023-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Pencapaian 3 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut

Sasaran 1. Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan dan pembangunan Industri di dukung oleh kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / kota,

Tabel 3.1

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun perencanaan	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024***	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	0,33	1,75	3,97	11,16	0,56	0,32 %

Sumber : BPS Flotim tahun 2024 , Ket : (***angka sangat sementara)

Pada tabel diatas berdasarkan data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur terlihat pada tahun 2024 laju pertumbuhan PDRB sektor industry pengolahan mengalami penurunan artinya nilai produksi mengalami hanya sedikit kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tetapi jika dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur tergolong tidak stabil karena setiap tahunnya mengalami naik turun.

(Tabel diatas merupakan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 menurut Harga Berlaku Tabel ** : Sumber BPS Kab Flotim)

➤ Permasalahan yang dihadapi :

Ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan kelompok industry kecil pengolahan belum berkembang dengan baik antara lain belum optimalnya

penggunaan teknologi tepat guna dalam proses IKM, sarana dan prasarana promosi dan pemasaran produk industry, perkembangan sentra industry yang potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas yang belum optimal, akan tetapi permasalahan yang paling sering dihadapi adalah permintaan dari desa/kelompok usaha untuk pelaksanaan pendampingan atau permintaan nara sumber namun tidak tersedianya anggaran oleh Dinas dan juga kurangnya SDM Dinas sebagai nara sumber.

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah mengusulkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah sehingga kedepannya dapat dilakukan peningkatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri melalui tenaga SDM yang terampil, Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dengan menitikberakan pada IKM dan peran serta masyarakat dalam tercapainya pelayanan teknologi industri dan meningkatkan kegiatan yang bersifat promosi

Sasaran 2. Pertumbuhan PDRB

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, didukung oleh kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri.

Tabel 3.2

Indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun perencanaan	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Pertumbuhsn PDRB	0,55	4,61	1,71	3,15	3,43	0,74 %

Sumber : BPS Flotim Tahun 2024

Pada table diatas terlihat pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan karena ada beberapa Produk Domestik Regional Bruto memiliki kontribusi yang signifikan pada sektor pertanian, Perkebunan, perikanan dan perdagangan bebas maka terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui angka Tahunan dalam hal ini tahun 2024 untuk PDRB belum dirilis, sehingga masih menggunakan hitungan angka sangat sementara, untuk Tahun 2024, PDRB mulai dihitung per Triwulanan,

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2023
		Total
1	2	3
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.32
B	Pertambangan dan Penggalian	1.39
C	Industri Pengolahan	11.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.05
F	Konstruksi	4.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.81
H	Transportasi dan Pergudangan	2.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.71
J	Informasi dan Komunikasi	3.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.99
L	Real Estate	2.10
M,N	Jasa Perusahaan	2.14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.15
P	Jasa Pendidikan	3.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		3.15

Tabel ** Sumber BPS Flotim 2024

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (%)

Kategori	Uraian	2023	
		Total	
1	2	3	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,760,667.0	
B	Pertambangan dan Penggalian	50,264.6	
C	Industri Pengolahan	56,859.6	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,873.0	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,722.0	
F	Konstruksi	269,461.3	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	535,794.4	
H	Transportasi dan Pergudangan	325,785.4	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,079.6	
J	Informasi dan Komunikasi	272,539.0	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	264,160.4	
L	Real Estate	179,524.9	
M,N	Jasa Perusahaan	4,697.7	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,012,205.1	
P	Jasa Pendidikan	924,730.8	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,794.8	
R,S,T,U	Jasa lainnya	227,891.2	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,062,050.8	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6,062,050.8	

** Sumber BPS Flotim

Kategori	Sektor	Lapangan Usaha
1		2
I	Primer	A (Pertanian) dan B (Penggalian)

Ii	Sekunder	C - F (industri pengolahan sampai Konstruksi)
Iii	Tersier	G - R,S,T,U (Perdagangan sampai Jasa Lainnya)

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTA RUPIAH) TAHUN 2024**

Kategori	Uraian	I	II	III	IV	Total
1	2	2	3	4	5	6
I	Primer	454,721.8	499,867.2	489,187.2	0.0	1,443,776.1
li	Sekunder	86,046.0	89,521.2	93,149.4	0.0	268,716.6
lii	Tersier	977,884.5	1,062,518.0	1,029,364.8	0.0	3,069,767.3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,518,652.2	1,651,906.4	1,611,701.4	0.0	4,782,260.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		1,518,652.2	1,651,906.4	1,611,701.4	0.0	4,782,260.1

- Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran strategis
Pada dasarnya dikarenakan rendahnya fiscal/keuangan daerah yang diakibatkan oleh beberapa factor seperti penurunan / rendahnya PAD, rendahnya tabungan atau kredit perbankan rendahnya belanja belanja daerah pada sector pendukung PDRB,
- Upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis diantaranya
 - Mendorong upaya optimalisasi semua potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi sector-sektor yang memungkinkan peningkatan PAD
 - Mendorong kesadaran masyarakat untuk berani memanfaatkan jasa perbankan untuk pengembangan usaha mikro
 - Pemerintah harus dapat mendorong belanja belanja yang lebih mengarah pada sector yang berkontribusi lebih bagi pertumbuhan PDRB daerah (sector pertanian, perkebunanm kelautan perikanan, Lingkungan hidup dan Koperasi)

Sasaran 3. Menurunkan Laju Inflasi Daerah

Sasaran ini dicapai melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan ditunjang oleh kegiatan Pengendalian Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten Kota.
Indikator sasaran ini dapat terlihat pada Tabel

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun percanaan	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Laju Inflasi Daerah	-2,02	0,45	3,12	3,33	3,10	6,9 %

Dari table diatas untuk realisasi tahun 2024 masing menggunakan angka sangat sementara karena data untuk PDRB tahun 2024 belum dirilis pada awal tahun . Terlihat laju inflasi daerah melebihi dari target yang ditetapkan akan berdampak pada naiknya harga pasar sedangkan penghasilan Masyarakat tidak mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Kabupaten Flores Timur tidak melakukan Survei Biaya Hidup yang akan menghasilkan Angka Inflasi, Angka Inflasi Larantuka menggunakan Angka Maumere sebagai Sister City.

Bulan	KOTA MAUMERE ³⁾		NTT	
	Inflasi YoY	Inflasi MtM	Inflasi YoY	Inflasi MtM
Jan	3.57	0.54	2.70	0.97
Feb	3.46	-0.37	3.01	-0.16
Mrt	0.95	-1.30	1.92	-0.14
Apr	2.00	1.10	2.35	0.31
Mei	2.25	0.21	2.41	-0.24
Jun	2.19	-0.40	1.54	-0.23
Jul	1.90	0.23	0.85	-0.32
Agst	1.12	-0.28	1.22	-0.25
Sept	1.39	0.48	1.07	-0.03
Okt	1.60	0.36	1.13	0.26
Nop	1.82	0.46	0.83	0.19
Des	2.65	1.64	1.19	0.82

Untuk menjembatani hal ini, Flores Timur merilis Angka Indeks Perubahan Harga yg dirilis setiap hari senin saat hari kerja

IPH FLORES TIMUR M1 DES 2024 sd M4 DES 2024

Minggu ke-	Indikator Perubahan Harga [IPH] (%)	Komoditas Andil Perubahan Harga	Fluktuasi Harga Tertinggi	
M1 Des 2024	0.43	Bawang Merah(0.3645), Bawang Putih(0.1169), Minyak Goreng(0.0126)	Bawang Putih	0.02
M2 Des 2024	2.53	Bawang Merah(0.3645), Bawang Putih(0.1111), Minyak Goreng(0.0221)	Bawang Putih	0.03
M3 Des 2024	0.47	Bawang Merah (0.3744), Bawang Putih (0.1166), Minyak Goreng(0.0253)	Bawang Putih	0.03
M4 Des 2024	0.53	Bawang Merah(0.3853), Bawang Putih(0.1281), Telur Ayam Ras(0.0574)	Bawang Putih	0.0284

Tingkat Inflasi yang ideal adalah sekitar 2 % pertahun angka ini dianggap cukup rendah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong optimism, dari table bisa dilihat bahwa Tingkat inflasi pada tahun 2023 cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 . Tahun 2023 di tutup dengan inflasi sebesar 3,33 persen pada Bulan Desember tahun 2023 dan tahun 2024 di tutup dengan inflasi sebesar 1,64 persen pada bulan Desember 2024. Inflasi MtM adalah membandingkan harga bulan H dengan bulan sebelumnya pada tahun berjalan .

Pada tahun 2024 untuk Kota Maumere mengalami 4 kali deflasi atau bisa dikatakan mengalami penurunan harga pada beberapa komoditi penting sedangkan inflasi terhitung terjadi di bulan Desember 2024. Untuk Inflasi Flores Timur yang ditargetkan sebesar 0,45 pada Tahun 2024, jika dilihat dari Kota Maumere dan NTT maka tidak bisa dicapai karena Inflasi Year of Year 2024 untuk Kota Maumere sebesar 2,65 dan NTT sebesar 1,19.

Indeks Perubahan Harga minggu ke-4 Tahun 2024 untuk Kota Larantuka sebesar 0,53%

- Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis

Tingkat inflasi yang meningkat bisa dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun daerah , hal ini dapat diartikan bahwa ekonomi mengalami kelebihan permintaan atas produk

yang melebihi kapasitas penawaran produksinya sehingga harga semua jenis produk cenderung mengalami kenaikan

- Upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis
 - Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten agar dapat bersinergi dan konsiten dalam melaksanakan tugas dan fungsi
 - Mengaktifkan satgas pangan di daerah yang bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Pemerintah
 - Melakukan gerakan tanam pangan cepat panen
 - Intensifkan jaringan pengaman social dan menjaga distribusi bahan pangan

Realisasi Anggaran dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Realisasi Anggaran

1	2	3	4		5		6		7	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			100	3.354.994.205		3.075.083.395		279.810.921,00		91,66%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.649.346.813		2.459.186.455		190.160.358,00		92,82%
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)								
		Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		55.141.155		49.257.455		5.883.700,00		89,33%

LAKIP 2024

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah(dok)	2	25.816.455	2	25.362.455		454.000,00	100%	98,24%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	7.649.150	2	7.649.150		-	100%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	3	9.992.050	3	9.992.050		-	100%	100,00%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah(laporan)	4	11.683.500	4	6.253.800		5.429.700,00	100%	53,53%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)		2.088.230.467		1.947.504.383		140.726.084,00		93,26%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	25/14 OB	2.018.330.467	25/14 OB	1.878.154.383		140.176.084,00	100%	93,05%

LAKIP 2024

	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	54.900.000	12	54.425.000		475.000,00	100%	99,13%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	12	15.000.000	12	14.925.000		75.000,00	100%	99,50%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Laporan BMD (%)		28.000.040		22.492.040		5.508.000,00		80,33%
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencanaa kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	1	10.000.000	1	9.162.000		838.000,00	100%	91,62%
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	6	10.000.000	6	9.990.000		10.000,00	100%	99,90%

LAKIP 2024

	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6	8.000.040	3	3.340.040		4.660.000,00	50%	41,75%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		14.949.742		14.877.442		72.300,00		99,52%
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12	4.950.000	12	4.912.000		38.000,00	100%	99,23%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)	1	9.999.742	1	9.965.442		34.300,00	100%	99,66%
	Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		163.438.849		144.770.075		18.668.774,00		88,58%
	Penyediaan Komponen Instalasi /Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan(paket)	3	3.010.510	1	90.000		2.920.510,00	33%	2,99%

LAKIP 2024

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	3	9.967.256	3	6.139.000		3.828.256,00	100%	61,59%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan(paket)	1	3.995.083	1	3.573.500		421.583,00	100%	89,45%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	1	24.995.000	1	19.168.075		5.826.925,00	100%	76,69%
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan(paket)	1	20.000.000	1	18.868.500		1.131.500,00	100%	94,34%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1	900.000	1	900.000		-	100%	100,00%
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu(laporan)	12	12.800.000	12	11.375.000		1.425.000,00	100%	88,87%

LAKIP 2024

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(laporan)	12	77.760.000	12	77.552.000		208.000,00	100%	99,73%
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada SKPD (dok)	1	10.011.000	1	7.104.000		2.907.000,00	100%	70,96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		44.817.200		40.408.200		4.409.000,00		90,16%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	20	9.817.500	30	9.813.500		4.000,00	150%	99,96%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3	29.999.700	6	25.984.700		4.015.000,00	200%	86,62%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5.000.000	3	4.610.000		390.000,00	100%	92,20%
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		118.837.610		114.502.860		4.334.750,00		96,35%

LAKIP 2024

	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat - menyurat(laporan)	12	1.502.610	12	887.360	615.250,00	100%	59,05%
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	44.885.000	12	41.165.500	3.719.500,00	100%	91,71%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	12	72.450.000	12	72.450.000	-	100%	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		135.931.750		125.374.000	10.557.750,00		92,23%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya(unit)	7	60.937.500	7	54.884.000	6.053.500,00	100%	90,07%

LAKIP 2024

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	5.000.000	1	1.700.000		3.300.000,00	100%	34,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangun lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)	2	19.994.250	2	18.790.000		1.204.250,00	100%	93,98%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	50.000.000	2	50.000.000		-	100%	100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				434.780.592		352.897.390		81.783.313,00		81,17%
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	30,56	109.998.352	30,56	108.662.540		1.335.812,00	100%	98,79%
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pengloalaan sarana distribusi perdagangan(unit)		99.998.962		99.139.900		859.062,00		99,14%
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (Unit)	1	99.998.962	1	99.139.900		859.062,00	100%	99,14%
	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)		9.999.390		9.522.640		476.750,00		95,23%

LAKIP 2024

	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan(Dokumen)	1	9.999.390	1	9.522.640		476.750,00	100%	95,23%
Menurunnya Laju inflasi daerah	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	189.999.234	19	117.145.984		72.753.361,00	100%	61,66%
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)		189.999.234		117.145.984		72.753.361,00		61,66%
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	1	19.999.740	1	19.899.740		111,00	100%	99,50%

LAKIP 2024

	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	1	49.999.992	1	49.729.742		270.250,00	100%	99,46%
	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(Laporan)	1	119.999.502	1	47.516.502		72.483.000,00	100%	39,60%
	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67	74.998.600	#####	67.886.200		7.112.400,00	100%	90,52%
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)		74.998.600		67.886.200		7.112.400,00		90,52%

LAKIP 2024

	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(unit)	300	65.000.000	209	58.306.200		6.693.800,00	70%	89,70%
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	100	9.998.600	90	9.580.000		418.600,00	90%	95,81%
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	22,73	59.784.406	22,73	59.202.666		581.740,00	100%	99,03%
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri		59.784.406		59.202.666		581.740,00		99,03%
	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota(UMKM)	3	24.785.500	19	24.670.000		115.500,00	633%	99,53%

LAKIP 2024

	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi(UMKM)	5	34.998.906	18	34.532.666		466.240,00	360%	98,67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				270.866.800		262.999.550		7.867.250,00		97,10%
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	30,3	270.866.800	30,3	262.999.550		7.867.250,00	100%	97,10%
	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/ Kota (Dokumen)		270.866.800		262.999.550		7.867.250,00		97,10%
	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana pembagunan industri (dok)	1	162.196.550	1	158.045.550		4.151.000,00	100%	97,44%
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat(dok)	1	108.670.250	1	104.954.000		3.716.250,00	100%	96,58%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Dalam rencana kinerja Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Hasil capaian kinerja menunjukkan, 2 (dua) indikator belum mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja melampaui target kinerja.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Tahun 2023 (*Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah atas Implementasi SAKIP Disperdagin Tahun 2023*), dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, antara lain :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai secara berjenjang mulai dari indikator kinerja eselon II, eselon III, eselon IV dan/atau Koordinator hingga capaian kinerja level staf pelaksana;
- meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal untuk perbaikan

dimasa yang akan datang;

- melengkapi penjelasan serta analisa atas keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja Dinas.

4.3 Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini masih belum sempurna, untuk itu pada Tahun 2025 ini kami berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan :

- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perdagangan dan perindustrian;
- Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang lebih intensif dengan berbagai pihak/instansi,
- Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan.
- Melanjutkan pemberian Reward bagi unit kerja yang memiliki kinerja keuangan baik (pencapaian target retribusi, kesesuaian penyerapan anggarankas/realisasi tertinggi).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur ini dibuat, demi kesempurnaan laporan ini, maka segala saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya visi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”.

Larantuka, Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur,

Siprianus Sina Ritan, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199003 1 056